BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4.1.1 Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung merupakan dinas daerah yang memegang peranan dan fungsi strategi di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Adapun visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung 2010-2013 adalah sebagai berikut:

1. **Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung**

   Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel dalam mendukung pemantapan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat.

2. **Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung**

a. Misi pertama, mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu
b. Misi kedua, mewujudkan penatausahaan keuangan dan asset yang tertib
c. Misi ketiga, mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Anggaran, membawahi :
    a. Seksi Anggaran Pendapatan
    b. Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan, Investasi
4. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
    a. Seksi Belanja Tidak Langsung
    b. Seksi Belanja Langsung
    c. Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas
5. Bidang Pemberdayaan Aset, membawahi :
    a. Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi
    b. Seksi Pemanfaatan Aset Daerah
    c. Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa
6. Bidang Akuntansi, membawahi :
    a. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan
    b. Seksi Akuntansi Belanja

c. Seksi Pencatatan dan Pelaporan

4.1.3 Job Description

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, tugas pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah danj pengelolaan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
b. Pelaksanaan tugas teknisi pengelolaan keuangan dan asset daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi
c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative dinas
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.1.4 Aktivitas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2010-2013

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program-program Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program peningkatan proses penyusunan APBD

   Kegiatan:

   a. Penyusunan kebijakan umum APBD dan PPAS
   b. Penyusunan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
   c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
   d. Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
   e. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD

2. Program peningkatan kualitas APBD

   Kegiatan:

   a. Penyusunan Standar Satuan Harga
   b. Penyusunan Analisa Stnadar Belanja

3. Program peningkatan pengelolaan keuangan daerah

   Kegiatan:

   a. Penyusunan/pemutakhiran system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
   b. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
   c. Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

4. Program pembinaan dan pelayanan bidang perbendaharaan

   Kegiatan:

   a. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

b. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

c. Peningkatan pelayanan perbendaharaan

5. Program peningkatan pengelolaan asset daerah

   Kegiatan:

   a. Penyusunan/pemutakhiran sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

   b. Pembangunan sistem informasi tanah milik daerah

   c. Penyusunan dan pemutakhiran data base aset

   d. Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah

   e. Peningkatan manajemen aset/barang daerah

   f. Pengkajian aset dan bukti kepemilikan perusahaan daerah

   g. Pengadaan tanah

6. Program pemfaatan aset

   Kegiatan:

   a. Pemutakhiran data base sewa aset tanah milik daerah

   b. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

7. Program pengamanan aset

   Kegiatan:

   a. Sertifikat tanah

   b. Fasilitas penyelesaian konflik-konflik pertanahan

8. Program peningkatan kualitas laporan keuangan

   Kegiatan:

   a. Penyusunan/pemutakhiran kebijakan akuntansi pemerintah daerah

b. Sosialisasi WAP

c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD

d. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggung-jawaban penjabaran pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD

4.2 Karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 86 responden. Untuk variabel X_1, X_2, dan Y kuesioner diberikan kepada objek yaitu Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut :

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

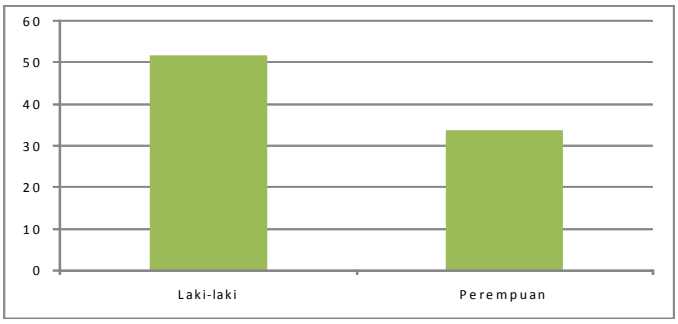
Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	52	60,47%
Perempuan	34	39,53%
Jumlah	86	100%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Diagram 4.1

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan Tabel 4.1 dan diagram 4.1 dapat diketahui profil Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung berdasarkan jenis kelamin. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 52 orang atau sebesar 60,47%, dan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 34 orang atau sebesar 39,53%, jadi responden paling banyak berdasarkan jenis kelamin adalah pria. Jumlah responden lebih banyak pria karena untuk menjalankan pengendalian adalah pria karena pria dianggap mampu menjalankan fungsi pengendalian dengan lebih baik dibandingkan pengendalian yang dijalankan oleh wanita.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2

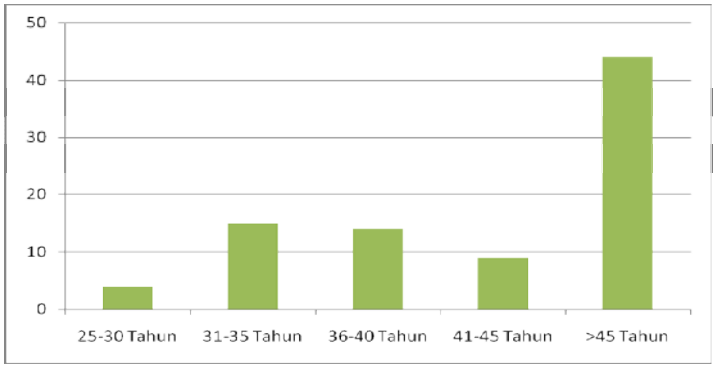
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
25-30 Tahun	4	4.65 %
31-35 Tahun	15	17.44 %
36-40 Tahun	14	16.28 %
41-45 Tahun	9	10.47 %
>45 Tahun	44	51.16 %
Jumlah	86	100 %

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Diagram 4.2

Profil Responden Berdasarkan Usia



Sumber : Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan Tabel 4.2 dan diagram 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia dibawah 25 - 30 tahun berjumlah 4 orang atau sebesar 4.65%, dan >45 tahun berjumlah 44 orang atau sebesar 51.16%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia >45 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada Pagawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lebih banyak berumur >45 tahun. Selain itu rata-rata usia Kepala Pagawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung berusia 31 - 40 tahun.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Profil responden pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Diagram 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3

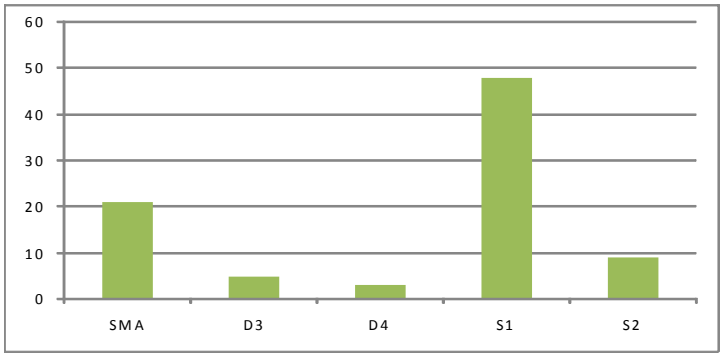
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA	21	24.42%
D3	5	5.81%
D4	3	3.49%
S1	48	55.81%
S2	9	10.47%
Jumlah	86	100%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Diagram 4.3

Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber : Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan Tabel 4.3 dan diagram dapat diketahui profil responden berdasarkan pendidikan terakhir. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang berpendidikan SMA berjumlah 21 orang atau 24.42%, responden yang berpendidikan D3 berjumlah 5

orang atau 5.81%, responden yang berpendidikan D4 berjumlah 3 orang atau 3.49%, responden yang berpendidikan S1 berjumlah 48 orang atau 55.81% dan responden yang berpendidikan S2 berjumlah 9 orang atau 10.47% . Jadi responden paling banyak berdasarkan pendidikan terakhir adalah S1.

4. Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja

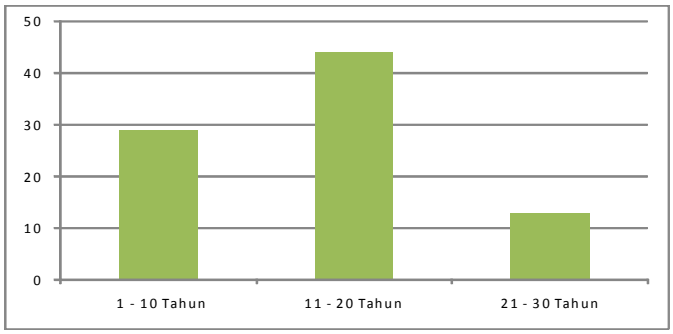
Profil responden berdasarkan lamanya bekerja dapat dilihat pada Tabel 4.4 seperti di bawah ini :

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
1 - 10 Tahun	29	33.72 %
11 - 20 Tahun	44	51.16%
21 - 30 Tahun	13	15.12%
Jumlah	86	100%

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Diagram 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja



Sumber : Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan Tabel 4.4 dan diagram 4.4 dapat diketahui responden berdasarkan lamanya bekerja. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden yang lama bekerjanya berkisar antara 1-10 tahun berjumlah 29 orang atau sebesar 33.72%, untuk responden yang lama bekerjanya antara 11-20

tahun berjumlah 44 orang atau sebesar 51.16%, dan responden yang lama bekerjanya antara 21-30 tahun berjumlah 13 orang atau sebesar 15.12%. Jadi responden yang paling banyak adalah yang lama bekerjanya antara 11-20 tahun.

4.3 Analisis Deskriptif

4.3.1 Sistem Pengendalian Intern

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 86 Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas Sistem Pengendalian Intern. Skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\,\text{skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Skor aktual adalah skor jawaban yang diperoleh dari seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan
b. Skor ideal adalah skor maksimum atau skor tertingi yang mungkin diperoleh jika semua responden memilih jawaban dengan skor tertingi.

Analisis kualitatif diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel sistem pengendalian intern. Untuk mendapatkan gambaran sistem pengendalian intern di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kelima dimensi dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Sistem Pengendalian Intern

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Lingkungan Pengendalian	2082	3870	53,80	Cukup Baik
2	Penilaian Resiko	715	1290	55,43	Cukup Baik
3	Kegiatan Pengendalian	2552	4730	53,95	Cukup Baik
4	Informasi dan Komunikasi	247	430	57,44	Cukup Baik
5	Pemantauan	228	430	53,02	Cukup Baik
Total		**5824**	**10750**	**54,18**	**Cukup Baik**

Perhitungan:
Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung cukup baik. Dimana unsur Sistem Pengendalian Intern didukung oleh teori menurut PP No.60 Tahun 2008 yang menyatakan unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan dilingkungan pemerintah diberbagai Negara sebagai berikut: Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Dengan demikian sistem pengendalian intern pada Dinas Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Di Pemkot Bandung sesuai dengan teori yang ditulis oleh Mahmudi (2007 : 27).

Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai Sistem Pengendalian Intern pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung berdasarkan dimensi:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat

Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkungan kerjanya. Dimensi lingkungan pengendalian diukur menggunakan 8 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 9 butir pernyataan. Untuk mendapatkan gambaran lingkungan pengendalian secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kedelapan indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Table 4.6
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Sistem Pengendalian Intern

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Penegakan Integritas Nilai Etika	479	860	55,70	Cukup Baik
2	Komitmen terhadap kompetensi	247	430	57,44	Cukup Baik
3	Kepemimpinan yang Kondusif	245	430	56,98	Cukup Baik
4	Memiliki Struktur Organisasi	222	430	51,63	Kurang Baik
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	206	430	47,91	Kurang Baik
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	233	430	54,19	Cukup Baik
7	Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif	226	430	52,56	Cukup Baik
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	224	430	52,09	Cukup Baik
Total		**2082**	**3870**	**53,80**	**Cukup Baik**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Secara keseluruhan aspek lingkungan pengendalian yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung pada umumnya cukup baik. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa indikator yang kurang baik antara lain memiliki struktur organisasi dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, hal ini sesuai dengan fenomena pada Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung yaitu adanya kelemahan struktur pengendalian intern dan kelemahan sistem pengendalian pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja (IHPS II tahun 2009). Berikut tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan pada dimensi lingkungan pengendalian:

A. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Penegakan integritas dan nilai etika dilakukan dengan:

a. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku dan penegakan disiplin pegawai
b. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku dan disiplin pada setiap tingkat pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah
c. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku dan disiplin
d. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern
e. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis dan melanggar peraturan disiplin pegawai

Dibawah ini jawaban responden mengenai penegakan integritas nilai etika adalah sebagai berikut:

Table 4.7
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Penegakan Integritas dan Nilai Etika

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan SOP pada Dinas DPKAD telah ditaati secara	f	10	24	23	17	12	255
		%	11,63%	27,91%	26,74%	19,77%	13,95%	100%
2	Ketersediaan SOP yang formal pada	f	13	32	23	12	6	224
		%	15,12%	37,21%	26,74%	13,95%	6,98%	100%

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
	Dinas DPKAD adalah terealisasi							
	Total	**f**	23	56	46	29	18	479
		%	13,37%	32,56%	26,74%	16,86%	10,47%	
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 55,70%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada Tabel 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{479}{2x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{479}{860} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 55{,}70\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 55,70% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik. Sebesar 27,91% pada umumnya responden kurang optimal dalam ketaatan pelaksanaan SOP pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung. SOP ini akan mengatur tentang prosedur baku pelaksanaan kegiatan agar dapat tertib administrasi. Nantinya, bentuk SOP ini menjadi peraturan yang mengikat dan menjadi acuan, utamanya dalam verifikasi dan pencairan uang daerah, sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan awal tentang alur dan mekanisme pengurusan pengelolaan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung.

Namun masih cukup banyak responden yang secara kurang optimal mentaati pelaksanaan SOP pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung yaitu sebesar 19,77%. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung adalah salah satu dinas yang secara tupoksi dapat dikategorikan sebagai dinas yang bergerak pada orientasi pelayanan publik. Sehingga, dengan demikian tata kerja dan pelayanan mesti diatur dalam bentuk prosedur baku (SOP) dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan.

Selanjutnya, 37,21% responden menyatakan adanya ketidakjelasan prosedur SOP formal pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung, sedangkan sebanyak 26,74% responden menyatakan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung sebagian prosedur SOP tidak formal. Hal ini menandakan SOP pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung tidak berjalan dengan optimal atau tidak ditaati.

Hal tersebut berkaitan dengan integritas nilai etika pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung yang dilihat dari total skor tanggapan responden sebesar 32,56% yang bisa dikatakan termasuk kategori kurang baik, diperjelas dengan tanggapan responden sebesar 26,74% berpendapat cukup baik. Oleh karena itu, kiranya kepala daerah agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dan memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

B. Komitmen Terhadap Kompetensi

Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diisyaratkan. Di bawah ini jawaban responden mengenai komitmen terhadap kompetensi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Komitmen Terhadap Kompetensi

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
3	Penyampaian laporan yang dilakukan oleh entitas Dinas DPKAD telah dilaksanakan	F	12	22	25	19	8	247
		%	13,95%	25,58%	29,07%	22,09%	9,31%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 57,44%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{247}{1x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{247}{430} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 57,44\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 57,44% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik. Terlihat bahwa sebesar 29,07% responden melakukan H+1 penyampaian laporan H+1 dari tanggal yang telah ditentutakan itu berarti penyampaian laporan keuangan telat sehari, yang mana dilakukan oleh entitas Dinas DPKAD, sedangkan 25,58% responden menjawab tepat waktu dari tanggal penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh entitas Dinas DPKAD. Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern. Namun, masih terdapat kelemahan dalam lingkungan pengendalian dari terlambatnya penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh Dinas DPKAD di Pemerintah Kota Bandung.

Komitmen terhadap kompetensi paling kurang dilakukan dengan:

a. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah
b. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah
c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
d. Memilih pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

C. Kepemimpinan yang Kondusif

Untuk membangun kondisi yang nyaman, maka lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan sebagai situasi dimana pemimpin selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian risiko. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif inilah, maka muncul kewajiban bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian risiko di instansinya. Di bawah ini jawaban responden mengenai kepemimpinan yang kondusif, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kepemimpinan yang Kondusif

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
4	Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak inspektorat pemkot bila telah berjalan	F	9	24	30	17	6	245
		%	10,47%	27,91%	34,88%	19,77%	6,98%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 56,98%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{245}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{245}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 56,98\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai kepemimpinan yang kondusif sebesar 56,98% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik. Mayoritas responden yaitu 34,88% menyatakan cukup optimal atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak inspektorat pemkot. Namun

masih cukup banyak responden yaitu 27,91% yang menyatakan tidak optimal atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak inspektorat pemkot. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawasan secara intern, dengan tujuanu untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan laporan keuangan (realisasi anggaran di sektor pemerintahan), serta ketaatan dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan intern didaerah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung yang melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintah Daerah.

D. Memiliki Struktur Organisasi

Struktur organisasi suatu satuan usaha membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada. Dengan memahami akan struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari manajemen dan elemen fungsional usaha dan menaksir bagaimana kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pengendalian yang dilaksanakan. Struktur organisasi perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat. Terhadap struktur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis secara berkala

tentang bentuk struktur yang tepat. Di bawah ini jawaban responden mengenai struktur organisasi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Struktur Organisasi

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
5	Kerangka kerja dalam melaksanakan perencanaan kegiatan telah mencapai	F	14	32	22	12	6	222
		%	16,28%	37,21%	25,58%	13,95%	6,98%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 51,63%								

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{222}{1x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{222}{430} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 51,63\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai kepemimpinan yang kondusif sebesar 51,63% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori kurang baik, hal ini dikarenakan kelemahan sistem pengendalian pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Mayoritas responden yaitu 37,21% menyatakan bahwa kerangka kerja dalam melaksanakan perencanaan kegiatan tidak memadai. Namun masih cukup banyak responden yaitu 25,58% yang menyatakan bahwa kerangka kerja dalam melaksanakan perencanaan kegiatan cukup memadai. Pengorganisasian perlaksanaan kegiatan mencakup aspek tahapan kegiatan dan jadwal pelaksanaan, organisasi pelaksana dan pendeskripsian tugas, serta mekanisme pelaporan.

E. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi delegasi wewenang adalah proses manajer mengalokasikan wewenang ke bawah yaitu pada orang-orang yang melapor kepadanya. Pelimpahan otoritas oleh atasan kepada bawahan diperlukan agar organisasi dapat berfungsi secara efisien karena tak ada atasan yang dapat mengawasi secara pribadi setiap tugas-tugas organisasi. Alasan perlunya pendelegasian, yaitu memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dan bila mereka menangani setiap tugas sendiri organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Di bawah ini jawaban responden mengenai pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.11
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
6	Wewenang & tanggung jawab pelaksanaan pemisahan tujuan & fungsi yang jelas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai kategori	F	19	32	24	4	7	206
		%	22,09%	37,21%	27,91%	4,65%	8,14%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 47,91%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{206}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{206}{430} \times 100\%$$

% skor tanggapan responden = 47,91%

Persentase total skor tanggapan responden mengenai pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebesar 47,91% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori kurang baik, hal ini dikarenakan kelemahan struktur pengendalian intern. Mayoritas responden yaitu 37,21% menyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan pemisahan tujuan dan fungsi yang jelas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak sesuai kategori. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan pemisahan tujuan dan fungsi yang jelas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cukup sesuai kategori yaitu 27,91%. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat harus dilaksanakan dengan memperhatikan sedikitnya hal-hal sebagai berikut:

a. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
b. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan
c. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP

F. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Dayan Manusia

Pegawai yang kompeten dan dipercaya amat penting artinya bagi pengendalian intern. Dengan adanya pegawai yang dapat dipercaya, pengendalian lainya dapat dikurangi karena hal ini sangat penting, metode-metode tentang pengangkatan, pengevaluasian, pelatihan, promosi dan kompensasi pegawai merupakan bagian penting dalam pengendalian intern. Di bawah ini jawaban responden mengenai penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.12
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
7	Penetapan sistem informasi akuntansi dan pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah mencapai katagori	F	11	27	31	10	7	233
		%	12,79	31,40	36,05	11,63	8,14	100
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 54,19%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{233}{1x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{233}{430} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 54,19\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM sebesar 54,19% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Mayoritas responden yaitu 36,05% menyatakan bahwa penetapan sistem informasi akuntansi dan pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cukup memadai. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa penetapan sistem informasi akuntansi dan pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak memadai yaitu 31,40%. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia wajib dilaksanakan dengan memperhatikan setidaknya ketentuan berikut:

a. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai
b. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen
c. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai

G. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern yang Efektif

Pengawasan internal yang ketat diharapkan mampu mengidentifikasikan dan meredam gejala *fraud*. Bentuk pengawasan internal yang ketat adalah dengan audit kinerja, audit investigatif dan audit laporan keuangan sesuai Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PERMEN PAN No. PER/05/M.PAN/03/2008) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

(SPKN). Di bawah ini jawaban responden mengenai perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.13
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern yang Efektif

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
8	Perwujudan peran atuan pengawasan intern dalam pengelolaan daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah tercapai secara	F	15	29	24	9	9	226
		%	17,44%	33,72%	27,91%	10,4%	10,47%	52,56%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 52,56%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{226}{1x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{226}{430} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 52,56\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif sebesar 52,56% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan struktur pengendalian intern. Mayoritas responden yaitu 33,72% menyatakan bahwa perwujudan peran atuan pengawasan intern dalam pengelolaan daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak efektif. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang

menyatakan bahwa perwujudan peran atuan pengawasan intern dalam pengelolaan daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cukup efektif yaitu 27,91%. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

   Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

H. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang mengelola anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan sehingga tercipta mekanisme saling uji. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Instansi pemerintah memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, serta melakukan pembahasan secara berkala tentang pelaporan keuangan dan anggaran, pengendalian intern serta kinerja
b. Pimpinan instansi pemerintah memiliki huubngan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang bersifat lintas instansi

Di bawah ini jawaban responden mengenai hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.14
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
9	Pelaksanaan bidang teknis anggaran pendapatan dan belanja di bidang teknis telah dilaksanakan sesuai peraturan.penyimpangan yang terjadi mencapai	F	15	26	29	10	6	224
		%	17,44%	30,23%	33,72%	11,63%	6,98%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 52,09%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{224}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{224}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 52{,}09\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait sebesar 52,09% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Mayoritas responden yaitu 33,72% menyatakan bahwa pelaksanaan bidang teknis anggaran pendapatan dan belanja di bidang teknis telah dilaksanakan sesuai peraturan penyimpangan yang terjadi mencapai 3 kasus. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan bidang teknis anggaran pendapatan dan belanja di bidang

teknis telah dilaksanakan sesuai peraturan penyimpangan yang terjadi mencapai 2 kasus yaitu 30,23%. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait dapat diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar-Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko

Dimensi penilaian resiko diukur menggunakan 2 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pernyataan. Untuk mendapatkan gambaran aspek penilaian resiko secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kedua dimensi dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Penilaian Resiko

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Identifikasi resiko	239	430	55,58	Cukup Baik
2	Analisis resiko	476	860	55,35	Cukup Baik
Aspek Kompetensi		**715**	**1290**	**55,43**	**Cukup Baik**

Perhitungan:
Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase skor tanggapan responden pada aspek penilaian resiko sebesar 55,43% dilihat secara keseluruhan, penilaian resiko pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung pada umumnya cukup baik. Berikut tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan pada dimensi penilaian resiko:

A. Identifikasi Resiko

Di bawah ini jawaban responden mengenai identifikasi resiko, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.16
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Identifikasi Resiko

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
10	Pelaksanaan belanja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai APBD dengan pencapaian	F	11	23	33	12	7	239
		%	12,79%	26,74%	38,37%	13,95%	8,14%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 55,58%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{239}{1x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{239}{430} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 55{,}58\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai penilaian resiko sebesar 55,58% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Mayoritas responden yaitu 38,37% menyatakan bahwa pelaksanaan belanja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai APBD dengan pencapaian 50% di luar APBD. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan belanja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

telah sesuai APBD dengan pencapaian < 20% di luar APBD yaitu 26,74%. Pelaksanaan identifikasi risiko meliputi:

a. Menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai tujuan Instansi Pemerintah dan tingkatan kegiatan
b. Mengidentifikasi dari faktor eksternal dan internal dengan menggunakan mekanisme yang memadai.
c. Melaksanakan penilaian atas adanya faktor lain yang dapat meningkatkan risiko

Mengidentifikasi secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan

B. Analisis Resiko

Di bawah ini jawaban responden mengenai analisis resiko, sebagai berikut:

Tabel 4.17
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Analisis Resiko

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
11	Dampak dari pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan yang tidak tepat mengakibatkan resiko	F	11	23	29	14	9	245
		%	12,79%	26,74%	33,72%	16,28%	10,47%	100%
12	Dampak pelaksanaan kebijakan anggaran belanja yang belum dilakukan mengakibatkan	F	12	24	34	11	5	231
		%	13,95%	27,91%	39,53%	12,79%	5,81%	100%
	Total	F	23	47	63	25	14	476
		%	13,37%	27,32%	36,63%	14,53%	8,14%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 55,35%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{476}{2x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{476}{860} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 55{,}35\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai analisis resiko sebesar 55,35% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Mayoritas responden yaitu 36,63% menyatakan bahwa analisis resiko pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cukup baik. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa analisis resiko pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kurang baik yaitu 27,32%. Analisis resiko dilakukan melalui:

a. Menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan
b. Mengidentifikasi Risiko dari faktor eksternal dan internal
c. Menerapkan prinsip kehati-hatian yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Instansi Pemerintah secara keseluruhan.
d. Memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang menuntut perhatian pimpinan pusat.

3. Aktivitas Pengendalian

Dimensi etika diukur menggunakan 11 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 11 butir pernyataan. Untuk mendapatkan gambaran aktivitas pengendalian secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor

tanggapan responden atas ketiga indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Aktivitas Pengendalian

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan	211	430	49,07	Kurang Baik
2	Pembinan SDM	259	430	60,23	Cukup Baik
3	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	254	430	59,07	Cukup Baik
4	Pengendalian fisik atas asset	228	430	53,02	Cukup Baik
5	Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja	230	430	53,49	Cukup Baik
6	Pemisahan fungsi	239	430	55,58	Cukup Baik
7	Otorisasi atas transaksi dab kejadian yang penting	223	430	51,86	Kurang Baik
8	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian	239	430	55,58	Cukup Baik
9	Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya	202	430	46,98	Kurang Baik
10	Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya	237	430	55,11	Cukup Baik
11	Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting	230	430	53,49	Cukup Baik
Aspek Etika		**2552**	**4370**	**58,40**	**Cukup Baik**

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan aktivita pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pemerintah Kota Bandung pada umumnya cukup baik. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen ubtuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif. Berikut tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan pada dimensi aktivitas pengendalian:

A. Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah yang Bersangkutan

Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan yaitu memantau pencapaian kinerja instansi pemerintah tersebut dibandingkan dengan rencana sebagi tolak ukur kinerja. Di bawah ini jawaban responden mengenai reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.19
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah yang Bersangkutan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
13	Pencapaian pelaksanaan belanja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di ukur dari mekanisme APBD telah tercapai	F	12	36	29	5	4	211
		%	13,95%	41,86%	33,72%	5,81%	4,65%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 49,07%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{211}{1x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{211}{430} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 49{,}07\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai analisis resiko sebesar 49,07% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori kurang baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Mayoritas responden yaitu 41,86% menyatakan bahwa pencapaian pelaksanaan belanja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di ukur dari mekanisme APBD tidak sesuai. Hal ini

kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di ukur dari mekanisme APBD cukup sesuai yaitu 33,72%. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan meliputi:

a. Reviu pada Tingkat Puncak – Pimpinan Instansi Pemerintah memantau pencapaian kinerja Instansi Pemerintah dibandingkan rencana sebagai tolok ukur kinerja.

   Reviu Manajemen pada Tingkat Kegiatan – Pimpinan Instansi pemerintah mereviu kinerja dibandingkan tolok ukur kinerja.

B. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Instansi Pemerintah memiliki strategi pembinaan sumber daya manusia yang utuh dalam bentuk rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan dokumen perencanaan sumber daya manusia lainnya yang meliputi kebijakan, program, dan praktek pengelolaan pegawai yang akan menjadi panduan bagi instansi pemerintah. Di bawah ini jawaban responden mengenai pembinaan SDM, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.20
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pembinaan SDM

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
14	Pelaksanaan ketersedian pembinaan Sumber Daya Manusia , Sistem Informasi Akuntansi dan pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memenuhi kriteria	f	8	21	30	16	11	259
		%	9,30%	24,42%	34,88%	18,60%	12,79%	100%

No	Butir Kuesioner	Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
		1	2	3	4	5	
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 60,23%							

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{259}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{259}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 60{,}23\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai pembinaan SDM sebesar 60,23% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Mayoritas responden yaitu 34,88% menyatakan bahwa pelaksanaan ketersedian pembinaan Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi dan pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cukup memadai. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan ketersedian pembinaan Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi dan pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kurang memadai yaitu 24,42%. Pembinaan Sumber Daya Manusia meliputi:

a. Pemahaman bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi Instansi Pemerintah.
b. Strategi pembinaan sumber daya manusia yang utuh
c. Strategi perencanaan sumber daya manusia yang spesifik dan eksplisit

d. Persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang diharapkan

e. Pimpinan Instansi Pemerintah membangun kerja sama tim, mendorong penerapan visi Instansi, dan mendorong umpan balik pegawai

C. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Di bawah ini jawaban responden mengenai pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.21
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
15	Ketersedian Sistem Informasi Akauntansi dan pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memenuhi kriteria	f	8	21	32	17	8	254
		%	9,30%	24,42%	37,21%	19,77%	9,30%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 59,07%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{254}{1x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{254}{430} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 59,07\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebesar 59,07% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Mayoritas

responden yaitu 37,21% menyatakan bahwa ketersedian Sistem Informasi Akauntansi dan pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cukup memadai. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa ketersedian Sistem Informasi Akauntansi dan pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kurang memadai yaitu 24,42%.

D. Pengendalian Fisik atas Aset

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai. Di bawah ini jawaban responden mengenai pengendalian fisik atas aset, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.22
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengendalian Fisik atas Aset

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
16	Pengendalian fisik atas asset dalam pencatatannya pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	f	16	25	27	9	9	228
		%	18,60%	29,07%	31,40%	10,47%	10,47%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 53,02%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{228}{1x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{228}{430} \text{ x } 100\%$$

% skor tanggapan responden = 53,02%

Persentase total skor tanggapan responden mengenai pengendalian fisik atas aset sebesar 53,02% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Mayoritas responden yaitu 31,40% menyatakan bahwa pengendalian fisik atas asset dalam pencatatannya pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cukup terkendali. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa Pengendalian fisik atas asset dalam pencatatannya pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terkendali yaitu 29,07%. Pengendalian fisik atas aset meliputi:

a. Penetapkan, pengimplementasikan, dan pengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur
b. Penetapan, pengimplementasikan, dan pengkomunikasikan rencana pemulihan setelah bencana (*disaster recovery plan*)

E. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat instansi pemerintah, kegiatan dan pegawai instansi pemerintah mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja. Di bawah ini jawaban responden mengenai penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.23
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Penetapan dan Reviu atas Indikator dan ukuran kinerja

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
17	Mekanisme penerimaan daerah dan hibah dalam proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaannya dilakukan	f	16	26	24	10	10	230
		%	18,60%	30,23%	27,91%	11,63%	11,63%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 53,49%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{230}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{230}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 53,49\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja sebesar 53,49% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Mayoritas responden yaitu 30,23% menyatakan bahwa mekanisme penerimaan daerah dan hibah dalam proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaannya dilakukan tidak sesuai aturan. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa

mekanisme penerimaan daerah dan hibah dalam proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaannya dilakukan cukup sesuai aturan yaitu 27,91%. Penetapan dan reviu indikator dan ukuran kinerja melalui:

a. Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat Instansi Pemerintah, kegiatan, dan pegawai.
b. Instansi Pemerintah mereviu dan memvalidasi periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.
c. Faktor penilaian pengukuran kinerja dievaluasi untuk meyakinkan bahwa faktor tersebut seimbang dan terkait dengan misi, sasaran, dan tujuan serta mengatur insentif yang pantas untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

   Data capaian kinerja dibandingkan secara terus-menerus dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

F. Pemisahan Fungsi

Pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang. Di bawah ini jawaban responden mengenai pemisahan fungsi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.24
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemisahan Fungsi

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
18	Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nilai berdasarkan pemisahan deskripsi jabatannya dengan capaian	f	11	26	29	11	9	239
		%	12,79%	30,23%	33,72%	12,79%	10,47%	100%

No	Butir Kuesioner	Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
		1	2	3	4	5	
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 55,58%							

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{239}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{239}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 55,58\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai pemisahan fungsi sebesar 55,58% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan struktur pengendalian intern. Mayoritas responden yaitu 33,72% menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nilai berdasarkan pemisahan deskripsi jabatannya dengan capaian cukup sesuai. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nilai berdasarkan pemisahan deskripsi jabatannya dengan capaian tidak sesuai yaitu 30,23%. Pelaksanaan pemisahan fungsi meliputi:

a. Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama transaksi atau kejadian.
b. Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan

pencatatan, pembayaran atau pemerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.

c. Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya *checks and balances*.

d. Jika memungkinkan, tidak seorangpun diperbolehkan menangani sendiri uang tunai, surat berharga, dan aset berisiko tinggi lainnya.

e. Saldo bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan kas.

f. Pimpinan Instansi Pemerintah mengurangi kesempatan terjadinya kolusi karena adanya kesadaran bahwa kolusi mengakibatkan ketidakefektifan pemisahan fungsi.

G. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan menkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai. Di bawah ini jawaban responden mengenai otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.25
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
19	Standar Operasional Program yang ada mencerminkan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang	f	13	33	23	10	7	223
		%	15,12%	38,37%	26,74%	11,63%	8,14%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 51,86%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{223}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{223}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 51{,}86\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebesar 51,86% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori kurang baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan struktur pengendalian intern. Mayoritas responden yaitu 38,37% menyatakan bahwa Standar Operasional Program yang ada mencerminkan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang tidak penting. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa Standar Operasional Program yang ada mencerminkan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang cukup penting yaitu 26,74%. Otorisasi transaksi dan kejadian penting meliputi:

a. Memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid diproses dan dientri, sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan Instansi Pemerintah Dokumentasi yang mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas.
b. Adanya pengendalian untuk memastikan Bahwa hanya transaksi dan kejadian signifikan yang dientri adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup otoritasnya.
c. Otorisasi yang secara spesifik

   Otorisasi yang ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pimpinan Instansi Pemerintah

H. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai. Di bawah ini jawaban responden mengenai pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.26
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
20	Pencatatan atas transaksi dan kejadian setiap aktivitas pengelolaan keuangan dilakukan	f	12	27	25	12	10	239
		%	13,95%	31,40%	29,07%	13,95%	11,63%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 55,58%								

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{239}{1x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{239}{430} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 55,58\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebesar 55,58% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Mayoritas responden yaitu 31,40% menyatakan bahwa pencatatan atas transaksi dan kejadian setiap aktivitas pengelolaan keuangan dilakukan tidak tepat waktu. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang

menyatakan bahwa pencatatan atas transaksi dan kejadian setiap aktivitas pengelolaan keuangan dilakukan cukup tepat waktu yaitu 29,07%. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu meliputi:

a. Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, bernilai, dan berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan.
b. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk seluruh siklus transaksi atau kejadian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar.

I. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatanya, pemerintah wajib memberikan aksen hanya kepada yang berwenang dan mealakukan reviu atas pemabtasan tersebut secara berkala. Di bawah ini jawaban responden mengenai pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.27
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
21	Akses atas sumber daya manusia dan pencatatannya dilakukan atas pemisahan fungsi dengan keluasan akses	f	20	30	27	4	5	202
		%	23,26%	34,88%	31,40%	4,65%	5,81%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 46,98%								

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{202}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{202}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 46{,}98\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebesar 46,98% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori kurang baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Mayoritas responden yaitu 34,88% menyatakan bahwa akses atas sumber daya manusia dan pencatatannya dilakukan atas pemisahan fungsi dengan keluasan akses terbatas. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa akses atas sumber daya manusia dan pencatatannya dilakukan atas pemisahan fungsi dengan keluasan akses cukup terbatas yaitu 31,40%. Pembatasan akses atas sumber daya dilakukan supaya:

a. Risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang berwenang.
b. Penetapan pembatasan akses untuk penyimpanan secara periodik direviu dan dipelihara.

c. Pimpinan Instansi Pemerintah mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan tingkat akses.

J. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatanya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkal. Di bawah ini jawaban responden mengenai akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.28
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
22	Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dilakukan dalam jangka waktu	f	12	32	18	13	11	237
		%	13,95%	37,21%	20,93%	15,12%	12,79%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 55,11%								

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{237}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{237}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 55{,}11\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebesar 55,11% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Mayoritas

responden yaitu 37,21% menyatakan bahwa akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dilakukan dalam jangka waktu kadang-kadang. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dilakukan dalam jangka waktu cukup sekali yaitu 20,93%. Akuntabilitas terhadap sumber antara lain:

a. Pertanggungjawaban atas penyimpanan, penggunaan, dan pencatatan sumber daya ditugaskan pegawai khusus.
b. Penetapan pertanggungjawaban akses untuk penyimpanan sumber daya secara periodik direviu dan dipelihara.
c. Pembandingan berkala antara sumber daya dengan pencatatan akuntabilitas.

Pimpinan Instansi Pemerintah menginformasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan catatan kepada pegawai.

K. Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern serta Transaksi dan Kejadian Penting

Instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhiran dokumentasi yang mencangkup seluruh system mengendalian intern serta tranksaksi dan kejadian penting. Di bawah ini jawaban responden mengenai dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.29
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern serta Transaksi dan Kejadian Penting

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
23	Proses penyusunan laporan dimulai dengan ketentuan yang berlaku	f	12	30	26	10	8	230
		%	13,95%	34,88%	30,23%	11,63%	9,30%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 53,49%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{230}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{230}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 53,49\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting sebesar 53,49% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Mayoritas responden yaitu 34,88% menyatakan bahwa proses penyusunan laporan dimulai dengan ketentuan yang berlaku tidak sesuai. Hal ini kemudian ditunjang dengan presentase jawaban responden yang menyatakan bahwa proses penyusunan laporan dimulai dengan ketentuan yang berlaku cukup sesuai yaitu 30,23%. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern antara lain meliputi:

a. Adanya dokumentasi tertulis mengenai SPI serta seluruh catatan transaksi dan kejadian penting.

b. Dokumentasi tersedia setiap saat pemeriksan
c. Dokumentasi mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas tujuan dan fungsi Instansi Pemerintah
d. Dokumentasi yang mencakup mencakup dokumentasi mengenai sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
e. Dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting yang lengkap dan akurat sehingga memudahkan penelusuran transaksi dan kejadian penting sejak otorisasi, inisiasi, pemrosesan, hingga penyelesaian.
f. Terdapat dokumentasi baik dalam bentuk catatan maupun elektronis.

Seluruh dokumentasi dikelola dan dipelihara secara baik

4. **Informasi dan Komunikasi**

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Dimensi informasi dan komunkasi diukur menggunakan 1 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 1 butir pernyataan. Untuk mendapatkan gambaran informasi dan komunikasi secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.30
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Aspek Informasi dan Komunikasi

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus	247	430	57,44	Cukup Baik
Aspek Informasi dan Komunikasi		**247**	**430**	**57,44**	**Cukup Baik**

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan aspek informasi dan komunikasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung pada umumnya sudah baik. Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus. Berikut tanggapan responden pada butir pernyataan pada dimensi informasi dan komunikasi:

A. Menyediakan dan Memanfaatkan Berbagai Bentuk dan Sarana Komunikasi serta Mengelola, Mengembangkan dan Memperbarui Sistem Informasi secara Terus-menerus

Di bawah ini jawaban responden mengenai menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.31
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Menyediakan dan Memanfaatkan berbagai Bentuk dan Sarana Komunikasi serta Mengelola, Mengembangkan dan Memperbarui Sistem Informasi secara Terus-menerus

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
24	Mekanisme penerimaan daerah dan hibah menggunakan ketersediaan dan pemanfaatan sarana komunikasi	f	8	24	32	15	7	247
		%	9,30%	27,91%	37,21%	17,44%	8,14%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 57,44%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{247}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{247}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 57,44\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus sebesar 57,44% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Mayoritas responden yaitu 37,21% menyatakan bahwa mekanisme penerimaan daerah dan hibah menggunakan ketersediaan dan pemanfaatan sarana komunikasi kadang-kadang. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa mekanisme penerimaan daerah dan hibah menggunakan ketersediaan dan pemanfaatan sarana komunikasi sekali yaitu 27,91%.

5. Pemantauan

Kegiatan pengelolaan rutin *supervise*, pembandingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas, dimana evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern. Dimensi pemantauan diukur menggunakan 1 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 1 butir pernyataan. Untuk mendapatkan gambaran pemantauan secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.32
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Aspek Pemantauan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern	228	430	53,02	Cukup Baik
Aspek Pemantauan		**228**	**430**	**53,02**	**Cukup Baik**

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan pemantauan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung sudah berjalan cukup baik. Pemantauan yang dilakukan meliputi proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Berikut tanggapan responden pada butir pernyataan pada dimensi pemantauan:

A. Evaluasi Terpisah dapat dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Pihak Eksternal Pemerintah serta Menggunakan Daftar Uji Intern

Di bawah ini jawaban responden mengenai evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.33
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Evaluasi Terpisah dapat dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Pihak Eksternal Pemerintah serta Menggunakan Daftar Uji Intern

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
25	Pihak eksternal dalam melakukan pengawasan pada satuan pengawas intern dilakukan secara	f	16	26	26	8	10	228
		%	18,60%	30,23%	30,23%	9,30%	11,63%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 53,02%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{228}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{228}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 53{,}02\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern sebesar 53,02% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan kelemahan struktur pengendalian intern. Mayoritas responden yaitu

30,23% menyatakan bahwa pihak eksternal dalam melakukan pengawasan pada satuan pengawas intern dilakukan secara tidak rutin dan kadang-kadang.

4.2.1.2 Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan mengenai penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung. Sama halnya dengan Sistem Pengendalian Intern jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal.

Analisis kualitatif diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Untuk mendapatkan gambaran tingkat penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kelima dimensi dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.34
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Akuntabilitas	1200	2150	55,81	Cukup Baik
2	Value for Money	644	1290	49,92	Kurang Baik
3	Probity	246	430	57,21	Cukup Baik
4	Transparansi	953	1720	55,40	Cukup Baik
5	Pengendalian	703	1290	54,50	Cukup Baik
Total		**3746**	**6880**	**54,45**	**Cukup Baik**

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 54,45% maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota

Bandung berjalan cukup baik, sehingga perlu ditingkatkan supaya menjadi lebih baik. Dimana prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah didukung oleh teori menurut Chabib dan Heru (2010:10) yang menyatakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijkan keuangan daerah sebagai berikut: akuntabilitas, *value for Money, probity,* transparansi dan pengendalian. Dengan demikian prinsip pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Di Pemkot Bandung sesuai dengan teori yang ditulis oleh Mahmudi (2007 : 27).

Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung berdasarkan dimensi.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berprilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat. Dimensi akuntabilitas diukur menggunakan 1 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 5 butir pernyataan. Untuk mendapatkan gambaran akuntabilitas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas satu indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.35

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Akuntabilitas

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Kerugian daerah	1200	2150	55,81	Cukup Baik
Akuntabilitas		**1200**	**2150**	**55,81**	**Cukup Baik**

Perhitungan:
Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan akuntabilitas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung termasuk dalam kategori cukup baik berdasarkan indikator kerugian daerah. Berikut tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan pada indikator akuntabilitas.

A. Kerugian Daerah

Di bawah ini jawaban responden mengenai besarnya biaya khusus, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.36
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Besarnya Biaya Khusus

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
26	Pengadaan barang untuk kegiatan aktivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	F	11	35	30	7	3	214
		%	12,79%	40,70%	34,88%	8,14%	3,49%	100%
27	Belanja barang yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengikuti ketentuan peraturan, capaiannya	F	11	29	28	11	7	232
		%	12,79%	33,72%	32,56%	12,79%	8,14%	100%
28	Ketidaksesuaian barang antara jumlah kebutuhan dan anggaran kondisinya	F	7	16	30	23	10	271
		%	8,14%	18,60%	34,88%	26,74%	11,63%	100%
29	Pembayaran honorarium atau biaya perjalanan dinas pejabat dilingkungan Dinas Pengelolaan	F	10	25	33	12	6	237
		%	11,63%	29,07%	38,37%	13,95%	6,98%	100%

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
	Keuangan dan Aset Daerah, memacu standar yang ditetapkan capaiannya							
30	Pengadaan jasa konsultasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menghindari jasa fiktif, capaiannya	F	10	25	27	15	9	246
		%	11,63%	29,07%	31,40%	17,44%	10,47%	100%
Total		F	49	130	148	68	35	1200
		%	11,39	30,23	34,42	15,81	8,14	55,81
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 55,81%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1200}{5x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1200}{2150} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 55{,}81\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai kerugian daerah sebesar 55,81% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan. Mayoritas responden yaitu 40,70% menyatakan bahwa pengadaan barang untuk kegiatan aktivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terpenuhi. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa pengadaan barang untuk kegiatan aktivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cukup terpenuhi yaitu 34,88%.

Mayoritas responden yaitu 33,72% menyatakan bahwa belanja barang yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengikuti ketentuan peraturan, capaiannya tidak sesuai ketentuan. Hal ini kemudian

ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa belanja barang yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengikuti ketentuan peraturan, capaiannya kadang-kadang sesuai ketentuan yaitu 32,56%.

Mayoritas responden yaitu 34,88% menyatakan bahwa ketidaksesuaian barang antara jumlah kebutuhan dan anggaran kondisinya cukup sesuai. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian barang antara jumlah kebutuhan dan anggaran kondisinya tidak sesuai yaitu 26,74%.

Mayoritas responden yaitu 38,37% menyatakan bahwa pembayaran honorarium atau biaya perjalanan dinas pejabat dilingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, memacu standar yang ditetapkan capaiannya cukup melebihi. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa pembayaran honorarium atau biaya perjalanan dinas pejabat dilingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, memacu standar yang ditetapkan capaiannya sesuai yaitu 29,07%.

Mayoritas responden yaitu 31,40% menyatakan bahwa pengadaan jasa konsultasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menghindari jasa fiktif, capaiannya jarang sering dilakukan. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa Pengadaan jasa konsultasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menghindari jasa fiktif, capaiannya kadang-kadang sering dilakukan yaitu 29,07%.

2. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*. Dimensi *value for money* diukur menggunakan 2 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pernyataan. Untuk mendapatkan gambaran *value for money* pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kedua indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.37
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai *value for money*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Ketidakhematan	435	860	50,58	Kurang Baik
2	Ketidakefektifan	209	430	48,60	Kurang Baik
Value For Money		**644**	**1290**	**49,92**	**Kurang Baik**

Perhitungan:
Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan *value for money* pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung termasuk dalam kategori kurang baik. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakhematan dimana adanya pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, adanya penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai

standar, dan terjadi pemborosan atau kemahalan harga. Berikut tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan pada indikator *value for money*:

A. Indikator Ketidakhematan

Di bawah ini jawaban responden mengenai ketidakhematan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.38
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Ketidakhematan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
31	Standar Pengelolaan keuangan daerah atas pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memperhitungkan standar harga satuan dengan nilai inflasi	f	14	31	28	8	5	217
		%	16,28%	36,05%	32,56%	9,30%	5,81%	100%
32	Penetapan kualitas dan kuantitas barang ditentukan standar harga satuan dengan kesesuain inflasi, capaiannya	f	18	26	26	10	6	218
		%	20,93%	30,23%	30,23%	11,63%	6,98%	100%
Total		f	32	57	54	18	11	435
		%	18,60%	33,14%	31,95%	10,46%	6,39%	
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 50,58%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{435}{2x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{435}{860} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 50,58\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai ketidakhematan sebesar 50,58% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori kurang baik sehingga perlu ditingkatkan. Mayoritas responden yaitu 36,05% menyatakan

bahwa standar pengelolaan keuangan daerah atas pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memperhitungkan standar harga satuan dengan nilai inflasi kadang-kadang diperhitungkan. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa standar pengelolaan keuangan daerah atas pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memperhitungkan standar harga satuan dengan nilai inflasi jarang diperhitungkan yaitu 32,56%. Hal ini tentunya mengakibatkan pemborosan keuangan daerah.

Mayoritas responden yaitu 30,23% menyatakan bahwa penetapan kualitas dan kuantitas barang ditentukan standar harga satuan dengan kesesuain inflasi, capaiannya tidak sesuai atau cukup sesuai. Hal ini disebabkan oleh penetapan kualitas dan kuantitas barang yang digunakan.

B. Indikator Ketidakefektifan

Di bawah ini jawaban responden mengenai ketidakefektifan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.39
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Ketidakefektifan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
33	Pengadaan barang/jasa memperhatikan kuantitas input, capaiannya	f	9	41	29	4	3	209
		%	10,47%	47,67%	33,72%	4,65%	3,49%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 48,60%								

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{209}{1x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{209}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 48{,}60\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai ketidakhematan sebesar 48,60% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori kurang baik sehingga perlu ditingkatkan. Mayoritas responden yaitu 47,67% menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa memperhatikan kuantitas input, capaiannya kurang melebihi kebutuhan. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa memperhatikan kuantitas input, capaiannya cukup melebihi kebutuhan yaitu 33,72%.

3. *Probity*

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan. Dimensi *probity* diukur menggunakan 1 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 1 butir pernyataan. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran aspek *probity* pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.40
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai *Probity*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Potensi Kerugian Daerah	246	430	57,21	Cukup Baik
Probity		**246**	**430**	**57,21**	**Cukup Baik**

Perhitungan:
Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan berdasarkan skor total responden mengenai *probity* pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota

Bandung sebesar 57,21% termasuk cukup baik, dalam arti potensi piutang atau pinjaman atau dana bergulir tidak tertagih tidak terlalu besar. Berikut tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan pada dimensi *probity*:

A. Indikator Potensi Kerugian Daerah

Di bawah ini jawaban responden mengenai potensi kerugian daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.41
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Potensi Kerugian Daerah

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
34	Pengakuan piutang atau pinjaman atau dana bergulir berpotensi tidak tertagih	F	11	24	26	16	9	246
		%	12,79%	27,91%	30,23%	18,60%	10,47%	100%
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 57,21%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{246}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{246}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 57,21\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai potensi kerugian daerah sebesar 57,21% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan. Mayoritas responden yaitu 30,23% menyatakan bahwa pengakuan piutang atau pinjaman atau dana bergulir berpotensi tidak tertagih cukup lancar. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa pengakuan piutang atau pinjaman atau dana bergulir berpotensi tidak tertagih tidak lancar yaitu 27,91%.

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah adanya aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijkan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dimensi transparansi diukur menggunakan 1 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran aspek transparansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.42
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Transparansi

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Administrasi	953	1.720	55,40	Cukup Baik
Transparansi		**953**	**1.720**	**55,40**	**Cukup Baik**

Perhitungan:
Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan berdasarkan skor total responden mengenai transparansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung sebesar 55,02% termasuk cukup baik, dalam arti temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku

baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. Berikut tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan pada dimensi transparansi:

A. Indikator Administrasi

Di bawah ini jawaban responden mengenai administrasi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.43
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Administrasi

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
35	Pertanggung jawaban atas belanja daerah TA.2009 pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung bukti dengan capaian	F	12	34	19	12	9	230
		%	13,95%	39,53%	22,09%	13,95%	10,47%	100%
36	Penyetoran penerimaan daerah kesesuaian dengan batas waktu yang ditentukan, capaiannya	F	15	29	21	15	6	226
		%	17,44%	33,72%	24,42%	17,44%	6,98%	100%
37	Jika terjadi sisa kas dibendahara pengeluaran diperlakukan	F	10	18	32	16	10	256
		%	11,63%	20,93%	37,21%	18,60%	11,63%	100%
38	Pengelolaan perlengkapan barang milik daerah mengikuti peraturan undang-undang, pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, capaian penyimpangannya	F	11	22	36	7	10	241
		%	12,79%	25,58%	41,86%	8,14%	11,63%	100%
Total		F	48	103	108	50	35	953
		%	13,95%	29,94%	31,39%	14,53%	10,17%	
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 55,40%								

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{953}{4x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{953}{1.720} \text{ x } 100\%$$

55,40%

Persentase total skor tanggapan responden mengenai administrasi sebesar 55,02% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan. Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, dan sisa kas di bendahara pengeluaran akhir TA terlambat/belum disetor ke kas daerah.

Mayoritas responden yaitu 39,53% menyatakan bahwa pertanggung jawaban atas belanja daerah TA.2009 pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung bukti dengan capaian tidak lengkap. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa pertanggung jawaban atas belanja daerah TA.2009 pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung bukti dengan capaian cukup lengkap yaitu 22,09%.

Mayoritas responden yaitu 33,72% menyatakan bahwa penyetoran penerimaan daerah kesesuaian dengan batas waktu yang ditentukan, capaiannya 0(tepat waktu). Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa penyetoran penerimaan daerah kesesuaian dengan batas

waktu yang ditentukan, capaiannya +1(telat sehari dari waktu yang ditentukan) yaitu 24,42%.

Mayoritas responden yaitu 37,21% menyatakan bahwa jika terjadi sisa kas dibendahara pengeluaran diperlakukan disimpan dibendahara. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa jika terjadi sisa kas dibendahara pengeluaran diperlakukan jarang dilaporkan yaitu 20,93%.

Mayoritas responden yaitu 41,86% menyatakan bahwa pengelolaan perlengkapan barang milik daerah mengikuti peraturan undang-undang, pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, capaian penyimpangannya biasa saja. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa pengelolaan perlengkapan barang milik daerah mengikuti peraturan undang-undang, pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, capaian penyimpangannya kecil yaitu 25,58%.

5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkindicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan. Dimensi pengendalian diukur menggunakan 1 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pernyataan. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran aspek pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung, dilakukan

rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.44
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Pengendalian

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Kekurangan Penerimaan	703	1.290	54,50%	Cukup Baik
Pengendalian		**703**	**1.290**	**54,50%**	**Cukup Baik**

Perhitungan:
Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan berdasarkan skor total responden mengenai pengendalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung sebesar 54,50% termasuk cukup baik, dalam arti temuan pengendalian mengungkap berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang , yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai. Berikut tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan pada dimensi pengendalian:

A. Kekurangan Penerimaan

Di bawah ini jawaban responden mengenai kekurangan penerimaan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.45
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kekurangan Penerimaan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
39	Penerimaan daerah atas denda keterlambatan pekerjaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan, penyetorannya dilakukan	F	11	24	31	11	9	241
		%	12,79%	27,91%	36,05%	12,79%	10,47%	100%
40	Penerimaan daerah yang penggunaanya dilakukan secara	F	10	21	36	7	12	248
		%	11,63%	24,42%	41,86%	8,14%	13,95%	100%
41	Tarif pajak daerah sesuai dengan ketentuan	F	15	29	32	5	5	214
		%	17,44%	33,72%	37,21%	5,81%	5,81%	100%

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
	pengenaannya							
	Total	**F**	36	74	99	23	26	703
		%	13,95%	28,68%	38,37%	8,91%	10,08%	
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 54,50%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{703}{3x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{703}{1.290} \text{ x } 100\%$$

$$54{,}50\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai administrasi sebesar 54,50% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan. Mayoritas responden yaitu 36,05% menyatakan bahwa penerimaan daerah atas denda keterlambatan pekerjaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan, penyetorannya dilakukan kadang-kadang saat disetorkan ke kas daerah. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa penerimaan daerah atas denda keterlambatan pekerjaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan, penyetorannya dilakukan tidak saat disetorkan ke kas daerah yaitu 27,91%.

Mayoritas responden yaitu 41,86% menyatakan bahwa penerimaan daerah yang penggunaanya dilakukan secara Biasa saja. Hal ini kemudian ditunjang

dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa penerimaan daerah yang penggunaanya dilakukan secara tidak dipergunakan yaitu 24,42%.

Mayoritas responden yaitu 37,21% menyatakan bahwa tarif pajak daerah sesuai dengan ketentuan pengenaannya cukup. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa tarif pajak daerah sesuai dengan ketentuan pengenaannya rendah yaitu 33,72%.

4.2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan mengenai kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung. Sama halnya dengan variabel Sistem Pengendalian Intern dan variabel penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah, jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal.

Analisis kualitatif diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel kualitas laporan keuangan daerah. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas keempat dimensi dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.46
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Daerah

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Relevan	726	1290	56,28	Cukup Baik
2	Andal	699	1290	54,19	Kurang Baik
3	Dapat dibandingkan	228	430	53,02	Cukup Baik
4	Dapat dipahami	209	430	48,60	Kurang Baik
Total		**1862**	**3440**	**54,13**	**Cukup Baik**

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 54,13% maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung cukup baik, sehingga perlu ditingkatkan supaya menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari pemanfaatan evaluasi kinerja menunjukan sangat kurang memenuhi kriteria yaitu hasil evaluasi belum ditinjak lanjuti untuk perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan untuk mengukur keberhasilan unit kinerja.

Dimana kualitas laporan keuangan daerah didukung oleh teori menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 yang menyatakan karakteristik laporan keuangan daerah yang merupakan persyaratan normative yang diperukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki sebagai berikut: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan demikian karakteristik laporan keuangan daerah pada Dinas Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Di Pemkot Bandung sesuai dengan teori yang ditulis oleh Mahmudi (2007 : 27).

Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung berdasarkan dimensi:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini dan memprediksi masa depan,

serta menegaskan atau mengeroksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya. Dimensi relevan diukur menggunakan 3 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pernyataan. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran aspek relevan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.47
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Relevan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Memiliki manfaat prediktif	255	430	59,30	Cukup Baik
2	Tepat waktu	224	430	52,09	Cukup Baik
3	Lengkap	247	430	57,44	Cukup Baik
Relevan		**726**	**1290**	**56,28**	**Cukup Baik**

Perhitungan:
Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan berdasarkan skor total responden mengenai relevan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung sebesar 56,28% termasuk cukup baik, dalam arti laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengeroksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Berikut tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan pada dimensi relevan:

A. Memiliki manfaat prediktif

Di bawah ini jawaban responden mengenai memiliki manfaat prediktif *(predictive value)* informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.48
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Memiliki manfaat prediktif

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
42	Kebermanfaatan kinerja mulai dari hasil evaluasi,penerapan manajemen kinerja dan keberhasilan unit kinerja upayanya	F	10	24	23	17	12	255
		%	11,63	27,91	26,74	19,77	13,95	59,30
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 59,30%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{255}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{255}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 59{,}30\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai memiliki manfaat prediktif *(predictive value)* informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini daerah sebesar 59,30% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan. Mayoritas responden yaitu 27,91% menyatakan bahwa kebermanfaatan kinerja mulai dari hasil evaluasi, penerapan manajemen kinerja dan keberhasilan unit kinerja upayanya kurang

prediktif. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa kebermanfaatan kinerja mulai dari hasil evaluasi,penerapan manajemen kinerja dan keberhasilan unit kinerja upayanya yaitu 26,74% cukup prediktif. Hasil pemeriksaan pemanfaatan evaluasi kkinerja menunjukan sangat kurang memenuhi kriteria.

B. Tepat Waktu

Di bawah ini jawaban responden mengenai tepat waktu, informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.49
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tepat waktu

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
43	Penyampaian pelaporan Dinas DPKAD pada inspektorat telah memenuhi batas waktu pengumpulan laporan	F	13	32	23	12	6	224
		%	15,12	37,21	26,74	13,95	6,9812	52,09
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 52,09%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{224}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{224}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 52,09\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai tepat waktu, informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan sebesar 52,09% bila merujuk pada tabel 3.9

termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan. Mayoritas responden yaitu 37,21% menyatakan bahwa penyampaian pelaporan Dinas DPKAD pada inspektorat telah memenuhi batas waktu pengumpulan laporan 0. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa penyampaian pelaporan Dinas DPKAD pada inspektorat telah memenuhi batas waktu pengumpulan laporan +1 yaitu 26,74%. Hasil pemeriksaan menunjukkan entitas telambat menyampaikan laporan.

C. Lengkap

Di bawah ini jawaban responden mengenai lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memperngaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.50
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Lengkap

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
44	Informasi akuntansi keuangan di sajikan laporan keuangan dengan criteria	F	12	22	25	19	8	247
		%	13,95	25,58	29,07	22,09	9,30	57,44
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 57,44%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{247}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{247}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 57{,}44\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah sebesar 57,44% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan. Mayoritas responden yaitu 29,07% menyatakan bahwa informasi akuntansi keuangan di sajikan laporan keuangan dengan kriteria cukup lengkap. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa informasi akuntansi keuangan di sajikan laporan keuangan dengan kriteria tidak lengkap yaitu 25,58%. Hasil pemeriksaan BPK RI memperoleh opini *disclaimer* (TMP)

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya. Dimensi andal diukur menggunakan

3 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pernyataan. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran aspek andal pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.51
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Andal

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Penyajian jujur	245	430	56,98	Cukup Baik
2	Dapat diverifikasi	222	430	51,63	Cukup Baik
3	Netralitas	232	430	53,95	Cukup Baik
Andal		**699**	**1290**	**54,19**	**Cukup Baik**

Perhitungan:
Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan berdasarkan skor total responden mengenai andal pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung sebesar 54,19% termasuk cukup baik, dalam arti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverikasi. Berikut tanggapan responden pada masing-masing butir pernyataan pada dimensi andal:

A. Penyajian jujur

Di bawah ini jawaban responden mengenai penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.52
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Penyajian Jujur

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
45	Informasi belanja pada	F	9	24	30	17	6	245

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
	dinas DPKAD dalam pelaksanaan memenuhi kriteria	%	10,47	27,91	34,88	19,77	6,98	56,98
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 56,98%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{245}{1x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{245}{430} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 56,98\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan sebesar 56,98% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan. Mayoritas responden yaitu 34,88% menyatakan bahwa informasi belanja pada dinas DPKAD dalam pelaksanaan memenuhi kriteria cukup wajar. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa informasi belanja pada dinas DPKAD dalam pelaksanaan memenuhi kriteria tidak wajar yaitu 27,91%. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, sehingga belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

B. Dapat Diverifikasi

Di bawah ini jawaban responden mengenai dapat diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian

dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.53
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Dapat Diverifikasi

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
46	Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan hasil dari pengujian	F	12	30	31	8	5	222
		%	13,95	34,88	36,05	9,30	5,81	51,63
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 51,63%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{222}{1x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{222}{430} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 51,63\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai dapat diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh sebesar 51,63% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan. Mayoritas responden yaitu 36,05% menyatakan bahwa informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan hasil dari pengujian cukup baik. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan hasil dari pengujian tidak baik yaitu 34,88%. Hasil pemeriksaan menunjukkan kinerja pencatatan keuangan sangat kurang memenuhi criteria yaitu ditunjukan dengan

hasil pemeriksaan BPKRI memperoleh opini "*disclaimer*", sehingga kinerja pencatatan keuangan sangat kurang memenuhi kriteria.

C. Netralitas

Di bawah ini jawaban responden mengenai netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.54
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Netralitas

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
47	Efek informasi ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penilaian netralitas dapat berpotensi menciptakan	F	13	32	19	12	10	232
		%	15,12	37,21	22,09	13,95	11,63	53,95
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 53,95%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{232}{1x5x86} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{232}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 53,95\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu sebesar 53,95% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan. Mayoritas responden yaitu 37,21% menyatakan bahwa efek informasi ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penilaian netralitas dapat berpotensi menciptakan

ketidakhematan. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa efek informasi ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penilaian netralitas dapat berpotensi menciptakan kekurangan permintaan yaitu 22,09%.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keauangan entitas pelaporan lain pada umunya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akauntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Dimensi dapat dibandingkan diukur menggunakan 1 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 1 butir pernyataan. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran aspek dapat dibandingkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.55
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Dapat Dibandingkan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal	228	430	53,02	Cukup Baik
Dapat Dibandingkan		**228**	**430**	**53,02**	**Cukup Baik**

Perhitungan:
Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan berdasarkan skor total responden mengenai dapat dibandingkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung sebesar 53,02% termasuk cukup baik, dalam arti informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keauangan entitas pelaporan lain pada umunya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Berikut tanggapan responden pada butir pernyataan pada dimensi dapat dibandingkan:

A. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal

Di bawah ini jawaban responden mengenai perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.56
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
48	Informasi laporan keuangan yang dilaporkan mencerminkan LKU sebagai perbandingan indikator kinerja pada Dinas DPKAD dengan pencapain	F	12	35	19	11	9	228
		%	13,95	40,70	22,09	12,79	10,47	53,02
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 53,02%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{228}{1x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{228}{430} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 53{,}02\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal sebesar 53,02% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori cukup baik sehingga perlu ditingkatkan. Mayoritas responden yaitu 40,70% menyatakan bahwa informasi laporan keuangan yang dilaporkan mencerminkan IKU sebagai perbandingan indikator kinerja pada Dinas DPKAD dengan pencapain tidak sesuai. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa informasi laporan keuangan yang dilaporkan mencerminkan IKU sebagai perbandingan indikator kinerja pada Dinas DPKAD dengan pencapain cukup sesuai yaitu 22,09%. Dari informasi LAKIP sangat kurang memenuhi kriteria yaitu tidak menyajikan sebagaian informasi mengenai pencapai IKU, perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan dan informasi kinerja dalam LAKIP belum dapat diandalkan menyusun dokumen IKU Pemerintah Kota Bandung dan SKPD sesuai Inpres Nomor 5/2004 dan SE Mentri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004, dengan demikian sangat kurang memenuhi kriteria yaitu tidak menyajikan sebagian informasi mengenai pencapaian IKU.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Dimensi dapat dipahami diukur menggunakan 1 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 1 butir pernyataan. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran aspek dapat dipahami pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.57
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Dapat Dipahami

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Batas pemahaman para pengguna	209	430	48,60	Kurang Baik
Dapat Dipahami		**209**	**430**	**48,60**	**Kurang Baik**

Perhitungan:
Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Secara keseluruhan berdasarkan skor total responden mengenai dapat dipahami pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung sebesar 48,60% termasuk kurang baik, dalam arti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Berikut tanggapan responden pada butir pernyataan pada dimensi dapat dipahami:

A. Batas Pemahaman Para Pengguna

Di bawah ini jawaban responden mengenai batas pemahaman para pengguna, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.58
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Batas Pemahaman Para Pengguna

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
49	Informasi laporan keuangan yang disajikan dalam pemahaman pelaksanaan didukung dokumen	F	9	41	29	4	3	209
		%	10,47	46,67	33,72	4,65	3,49	48,60
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 48,60%								

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{209}{1x5x86} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{209}{430} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 48,60\%$$

Persentase total skor tanggapan responden mengenai batas pemahaman para pengguna sebesar 48,60% bila merujuk pada tabel 3.9 termasuk dalam kategori kurang baik sehingga perlu ditingkatkan. Mayoritas responden yaitu 46,67% menyatakan bahwa informasi laporan keuangan yang disajikan dalam pemahaman pelaksanaan didukung dokumen tidak lengkap. Hal ini kemudian ditunjang dengan prosentase jawaban responden yang menyatakan bahwa informasi laporan keuangan yang disajikan dalam pemahaman pelaksanaan didukung dokumen cukup lengkap yaitu 33,72%. Hasil pemeriksaan menunjukkan Pemkot Bandung mendapat nilai C (agak kurang perlu banyak perbangkan termasuk perubahan yang mendasar), sehingga pertanggung jawaban tidak akuntael (bukti tidak lengkap/ tidak valid.

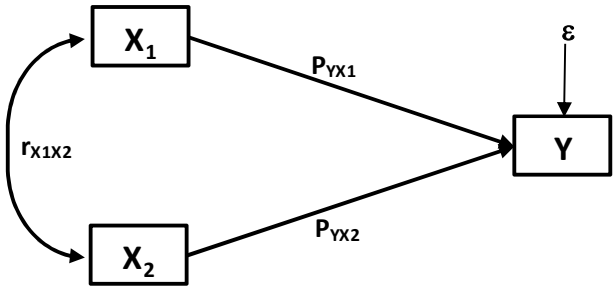
4.4 Analisis Verifikatif

Setelah diuraikan gambaran data variabel penelitian, selanjutnya untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah maka dilakukan pengujian statistik baik secara simultan maupun parsial, namun sebelum data sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah diolah terlebih dahulu dikonversi menjadi data interval menggunakan *Method Succesive Interval*. Pengujian dilakukan dengan bantuan software *SPSS 15 for windows* dan adapun langkah-langkah analisis kuantitatif yang diuraikan adalah sebagai berikut :

4.4.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung

Semakin baik sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah dapat menaikan kualitas laporan keuangan daerah. Pada penelitian ini akan diuji pengaruh sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pengujian akan dilakukan dua tahap, dimana pada tahap pertama akan diuji hubungan sistem pengendalian intern dengan pengelolaan keuangan daerah, kemudian pada tahan kedua akan diuji pengaruh dari sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara diagram bentuk hubungan

antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1 Diagram Jalur Paradigma Penelitian

Gambar diagram jalur seperti terlihat diatas dapat diformulasikan ke dalam bentuk persamaan struktural sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = P_{YX1}X_1 + P_{YX1}X_1 + \varepsilon}$$

Keterangan:

Y = Kualitas laporan keuangan daerah

X_2 = Pengelolaan keuangan daerah

X_1 = Sistem pengendalian intern

$\mathbf{P_{YX1}}$ = Koefisien jalur sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah

$\mathbf{P_{YX2}}$ = Koefisien jalur pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

$\mathbf{r_{X1X2}}$ =Koefisien sistem pengendalian intern dengan jalur pengelolaan keuangan daerah

ε = Pengaruh faktor lain

4.4.1.1 Analisis Korelasi

Dari data masing-masing variabel yang terkumupul, dibuat rekap data untuk perhitungan analisis jalur sebagai berikut:

Tabel 4.59
Rekap Data Variabel X_1, X_2, dan Y Untuk Perhitungan Analisis Jalur

NO	X1	X2	Y	X1.Y	X2.Y	X1.X2	X12	X22	Y2
1	2.93	3.42	2.57	7.5301	8.7894	10.0206	8.5849	11.6964	6.6049
2	3.6	2.99	3.37	12.132	10.0763	10.764	12.96	8.9401	11.3569
3	3.51	3.43	3.71	13.0221	12.7253	12.0393	12.3201	11.7649	13.7641
4	3.56	3.48	4.12	14.6672	14.3376	12.3888	12.6736	12.1104	16.9744
5	1.96	2.23	2.99	5.8604	6.6677	4.3708	3.8416	4.9729	8.9401
6	3.06	2.67	3.22	9.8532	8.5974	8.1702	9.3636	7.1289	10.3684
7	3.54	3.24	3.66	12.9564	11.8584	11.4696	12.5316	10.4976	13.3956
8	3.36	3.27	3.59	12.0624	11.7393	10.9872	11.2896	10.6929	12.8881
9	3.3	3.26	3.49	11.517	11.3774	10.758	10.89	10.6276	12.1801
10	3.82	3.21	3.44	13.1408	11.0424	12.2622	14.5924	10.3041	11.8336
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	3.34	3.37	3.34	11.1556	11.2558	11.2558	11.1556	11.3569	11.1556
85	2.92	3.11	3.12	9.1104	9.7032	9.0812	8.5264	9.6721	9.7344
86	3.26	3.43	3.33	10.8558	11.4219	11.1818	10.6276	11.7649	11.0889
Σ	**221.55**	**225.36**	**226.02**	**602.5995**	**607.6755**	**594.6912**	**592.1613**	**606.1122**	**621.2344**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Hasil komputasi analisis jalur menggunakan bantuan software SPSS 15.0 dapat dilihat pada lampiran. Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar sesama variabel independen, maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel interpretasi koefisien korelasi berikut:

Tabel 4.60
Pedoman Pengklasifikasian Koefisien Korelasi

No	Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
1	0,000 – 0,199	Sangat rendah
2	0,200 – 0,399	Rendah
3	0,400 – 0,599	Sedang
4	0,600 – 0,799	Kuat
5	0,800 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, 2009; 250

Variabel bebas pada penelitian ini adalah sistem pengendalian intern (X_1), dan pengelolaan keuangan daerah (X_2) dan variabel dependen kualitas laporan keuangan daerah (Y), koefisien korelasi diantara ketiga variabel bebas tersebut dihitung menggunakan rumus berikut.

$$r_{X_1X_2} = \frac{n\sum X_1X_2 - \sum X_1 \sum X_2}{\sqrt{\left[\left(n\sum X_1^2 - \left(\sum X_1\right)^2\right) \times \left(n\sum X_2^2 - \left(\sum X_2\right)^2\right)\right]}}$$

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara sistem pengendalian intern (X_1) dengan pengelolaan keuangan daerah (X_2) sebesar 0.774. untuk hasil lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang analisis korelasi. Selanjutnya dihitung koefisien korelasi antara sistem pengendalian intern (X_1) dengan jumlah kualitas laporan keuangan daerah (Y) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{X_1Y} = \frac{n\sum X_1Y - \sum X_1 \sum Y}{\sqrt{\left[\left(n\sum X_1^2 - \left(\sum X_1\right)^2\right) \times \left(n\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right)\right]}}$$

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara sistem pengendalian intern (X_1) dengan kualitas laporan keuangan daerah (Y) sebesar 0.843. untuk hasil lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang analisis korelasi. Selanjutnya

dihitung koefisien korelasi antara pengelolaan keuangan daerah (X_2) dengan kualitas laporan keuangan daerah (Y) menggunakan rumus sebagai berikut.

$$r_{X_2Y} = \frac{n\sum X_2Y - \sum X_2 \sum Y}{\sqrt{\left[\left(n\sum X_2^2 - \left(\sum X_2\right)^2\right) \times \left(n\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right)\right]}}$$

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara sistem pengendalian intern (X_1) dengan kualitas laporan keuangan daerah (Y) sebesar 0.748. untuk hasil lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang analisis korelasi. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS 15 diperoleh koefisien korelsi antara ketiga variabel tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.61
Korelasi Antar Variabel Penelitian

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1,000	,843	,748
	X1	,843	1,000	,774
	X2	,748	,774	1,000
Sig. (1-tailed)	Y	.	,000	,000
	X1	,000	.	,000
	X2	,000	,000	.
N	Y	86	86	86
	X1	86	86	86
	X2	86	86	86

Berdasarkan nilai koefisien korelasi diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara sistem pengendalian intern (X_1) dangan pengelolaan keuangan daerah (X_2) sebesar 0.774 dan masuk dalam kategori kuat. Arah hubungan positif antara sistem pengendalian intern dengan pengelolaan keuangan daerah menujukkan bahwa sistem pengendalian intern yang tinggi diikuti pula dengan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian hubungan antara sistem pengendalian

intern (X_1) dengan kualitas laporan keuangan daerah (Y) sebesar 0.843 termasuk dalam kategori sangat kuat, sementara hubungan antara pengelolaan keuangan daerah (X_2) dengan kualitas laporan keuangan daerah (Y) sebesar 0.748 termasuk dalam kategori kuat dengan arah positif.

4.4.1.2 Perhitungan Koefisien Jalur

Pada diagram jalur dapat dilihat variabel sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan kualitas laporan keuangan daerah sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menyusun matriks korelasi antar variabel independen, dalam penelitian ini yang menjadi variabel penyebab adalah sistem pengendalian intern (X_1) dan pengelolaan keuangan daerah (X_2).

$$R = \begin{array}{c} \\ X_1 \\ X_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X_1 & X_2 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1{,}000 & 0{,}774 \\ 0{,}774 & 1{,}000 \end{bmatrix} \end{array}$$

2) Menghitung invers dari matriks korelasi antara sistem pengendalian intern (X_1) dan pengelolaan keuangan daerah (X_2).

$$R^{-1} = \begin{array}{c} \\ X_1 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X_1 & X_2 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 2{,}494 & -1{,}930 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$X_2 \begin{bmatrix} -1{,}930 & 2{,}494 \end{bmatrix}$$

3) Menyusun matrik korelasi antara variabel independen (sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah) dengan kualitas laporan keuangan daerah.

$$R = \begin{array}{c} \\ X_1 \\ X_2 \end{array} \begin{array}{c} Y \\ \begin{bmatrix} 0{,}843 \\ 0{,}748 \end{bmatrix} \end{array}$$

4) Selanjutnya untuk memperoleh koefisien jalur, kalikan invers dari matriks korelasi antara variabel independen terhadap matriks korelasi variabel independen dengan variabel dependen.

$$\begin{bmatrix} P_{X1Y} \\ P_{X2Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2{,}494 & -1{,}930 \\ -1{,}930 & 2{,}494 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0{,}843 \\ 0{,}748 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P_{X1Y} \\ P_{X2Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}658 \\ 0{,}240 \end{bmatrix}$$

Jadi diperoleh koefisien jalur untuk variabel sistem pengendalian intern sebesar 0,658 dan koefisien jalur variabel pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,240. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.15 diperoleh koefisien jalur sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.62
Koefisien jalur sistem pengendalian dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,109	,200		-,545	,587
	X1	,740	,101	,657	7,329	,000
	X2	,317	,118	,240	2,678	,009

a. Dependent Variable: Y

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,657 dan 0,240 pada tabel 4.62 merupakan nilai koefisien jalur sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4.4.1.3 Perhitungan Koefisien Determinasi

Melalui koefisien jalur yang telah diperoleh, selanjutnya dihitung koefisien determinasi, yaitu besar kontribusi/pengaruh sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama. Koefisien determinasi didapat dari hasil perkalian koefisien jalur terhadap matriks korelasi antara variabel penyebab dengan kualitas laporan keuangan daerah.

$$R^2 y_{X1/X2} = [0{,}657 \quad 0{,}240] \times \begin{bmatrix} 0{,}843 \\ 0{,}748 \end{bmatrix}$$

$$= 0{,}733$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.15 diperoleh koefisien determinasi sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.63
Koefisien determinasi tingkat sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

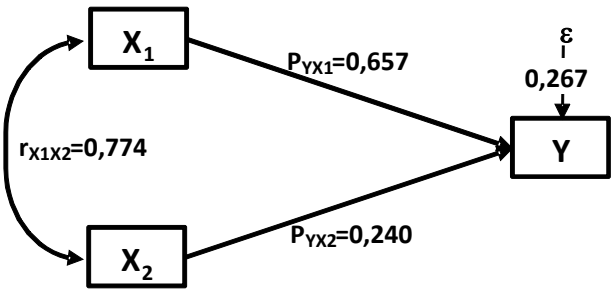
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,856[a]	,733	,727	,29602

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Melalui nilai koefisien determinasi dapat diketahui bahwa secara bersama-sama sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 73,3% terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung. Sisanya sebesar 26,7% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel yang sedang diteliti seperti sistem akuntansi dan standar akuntasi pemerintah. Secara visual jalur dari variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Diagram Dan Koefisien Jalur

Melalui diagram jalur tersebut dapat dihitung besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung.

- Pengaruh langsung sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah $=(P_{YX_1})^2 =$ (0,657) x (0,657) = 0,432 **(43,2%).**
- Pengaruh tidak langsung sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah= P_{YX_1} x $r_{X_1X_2}$ x P_{YX_2} = (0,657) x (0,774) x (0,240) = 0,122 **(12,2%)**

Jadi total pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung **= 43,2% + (12,2%) = 55,4%** dengan arah positif. Artinya sistem pengendalian intern yang makin meningkat cenderung membuat kualitas laporan keuangan daerah semakin baik.

Besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung.

- Pengaruh langsung pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah $=(P_{YX_2})^2 =$ (0,240) x (0,240) = 0,058 **(5,8%)**
- Pengaruh tidak langsung pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui sistem pengendalian intern = P_{YX_2} x $r_{X_1X_2}$ x P_{YX_1} = (0,240) x (0,774) x (0,657) = 0,122 **(12,2%).**

Jadi total pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung **= 5,8% + (12,2%) = 18%** dengan arah positif. Artinya pengelolaan keuangan daerah yang makin baik cenderung meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

4.4.2 Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah memberikan pengaruh yang signfikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah baik secara bersama-sama maupun secara parsial, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian dimulai dari pengujian secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan pengujian secara parsial.

- **Pengujian Koefisien Jalur Secara Bersama-sama.**

Hipotesis Statistik:

Ho: $\rho_{YX1} = \rho_{YX2} = 0$ Sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Ha: $\rho_{YX1} \neq \rho_{YX2} \neq 0$ Sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Untuk menguji hipotesis diatas digunakan uji F dengan formula sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{(n-k-1)R^2_{Y(X_1X_2)}}{k(1-R^2_{Y(X_1X_2)})}$$

$$F_{hitung} = \frac{(86-2-1)\times 0.733}{2\times(1-0.733)}$$

$$= 113.909 \quad \text{(Pembulatan)}$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.15 diperoleh nilai F_{hitung} pengaruh sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebagai berikut.

Tabel 4.64
Uji Anova untuk uji pengaruh sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19,964	2	9,982	113,909	,000[a]
	Residual	7,273	83	,088		
	Total	27,237	85			

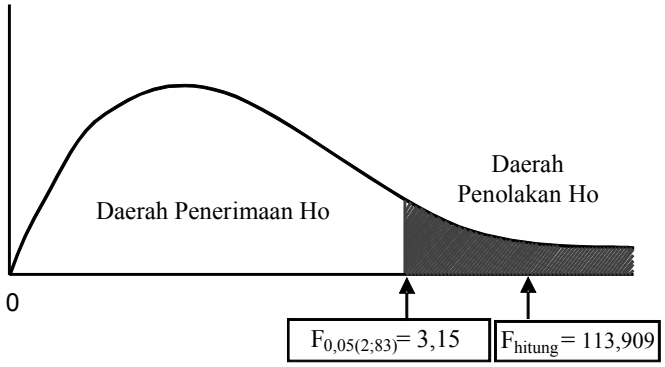
a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel pengujian diatas dapat dilihat nilai F_{hitung} sebesar 113,909 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,000. Sementara dari tabel F untuk tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (2;83-2-1) diperoleh $F_{0,05(2;83)}$ = 3,15. Karena F_{hitung} (113,909) lebih besar dibanding F_{tabel} (3,15) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan system pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung.

Besarnya kontribusi atau pengaruh dari sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung sebesar 73,3%, sedangkan sisanya sebesar 26,7% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel tersebut seperti sistem akuntansi dan standar akuntansi pemerintahan. Secara visual daerah penolakan dan penerimaan Ho pada uji pengaruh dari sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan daerah dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.3
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Simultan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kaulitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena F_{hitung} sebesar 113,909 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa tingkat sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah

secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung.

- **Pengujian Koefisien Jalur Secara Parsial**

Karena dari hasil pengujian secara bersama-sama menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan, selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial untuk melihat lebih jelas variabel mana saja diantara kedua variabel independen, yaitu sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah yang pengaruhnya signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Untuk menguji koefisien jalur dari masing-masing variabel eksogen tersebut digunakan uji t, dengan formula sebagai berikut:

- $t_i = \dfrac{P_{ZXi}}{\sqrt{\dfrac{\left(1-R^2_{Z.XY}\right)\times C_{ii}}{\left(n-k-1\right)}}}$

a. Pengaruh Sistem pengendalian intern Terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Hipotesis:

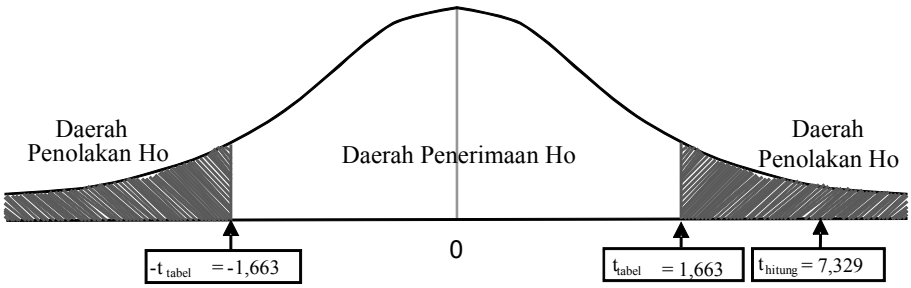
Ho: $\rho_{ZX} = 0$ Sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Ha: $\rho_{ZX} \neq 0$: Sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Statistik uji: $t_{hitung} \dfrac{0,657}{\sqrt{\dfrac{(1-0,783)\times 2,494}{(86-2-1)}}} = 7,329$

Nilai statistik uji t sebesar 7,329 sama dengan nilai t yang terdapat pada tabel 4.7, selanjutnya nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai t dari tabel.

Dari tabel t dengan tingkat signifikansi (0.05) dan derajat bebas 83 diperoleh nilai sebesar 1,663. Karena t_{hitung} (7,329) lebih besar dibanding t_{tabel} (1,663) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menolak Ho dan menerima hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung. Secara visual daerah penolakan dan penerimaan Ho pada uji pengaruh tingkat inflasi terhadap jumlah permintaan kredit dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.4
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial Pengaruh Sistem pengendalian intern Terhadap Kualitas laporan keuangan daerah

Berdasarkan gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena t_{hitung} sebesar 7,329 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Mahmudi (2007:27), Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah

diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

b. Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Hipotesis:

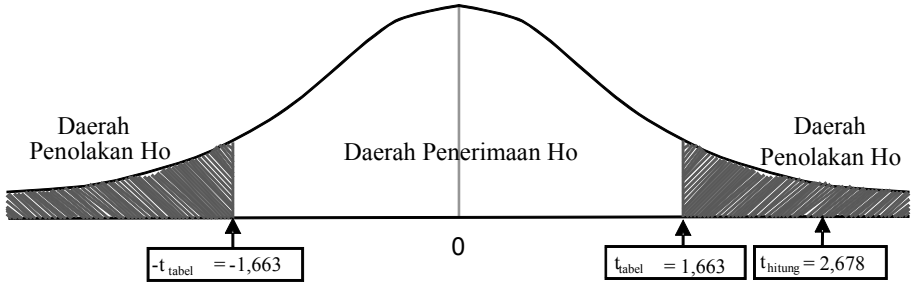
Ho: $\rho_{ZY} = 0$ Pengelolaan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Ha: $\rho_{ZY} \neq 0$: Pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Statistik uji: $t_{hitung} \frac{0,240}{\sqrt{\frac{(1-0,733)\times 2,494}{(86-2-1)}}} = 2,678$

Nilai statistik uji t sebesar 2,678 sama dengan nilai t yang terdapat pada tabel 4.7, selanjutnya nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai t dari tabel. Dari tabel t dengan tingkat signifikansi (0.05) dan derajat bebas 83 diperoleh nilai sebesar 1,663. Karena t_{hitung} (2,678) lebih besar dibanding t_{tabel} (1,663) maka pada tingkat kekeliruan 5% ada alasan yang kuat untuk menerima Ho dan menolak hipotesis penelitian (Ha), sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung. Secara visual daerah penolakan dan penerimaan Ho pada uji pengaruh pengelolaan

keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.5
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Pengaruh Sistem pengendalian intern Terhadap Kualitas laporan keuangan daerah

Berdasarkan gambar 4.6 diatas dapat dilihat bahwa Ho diterima, karena t_{hitung} sebesar 2,678 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah di Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Mahmudi (2007:27), Kualitas dari hasil (*outcame*) pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus pengelolaan pada setiap tahap, baik tahap perencanaan, implementasi maupun pelaporan.